



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



**DINAS KEBUDAYAAN
KAB. BONE**

TAHUN 2021

A large, dark bronze statue of Lord Krishna, depicted as a warrior, holding a long spear in his right hand. He is adorned with a crown, a garland of flowers, and a peacock feather in his matted hair. The statue is set against a light blue sky.

[illegible]

Artinya : “Saya telah berkelala (berkeliling dunia, namun belum pernah kutemukan, yang sama (indahnyanya) dengan negeri Bone”

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone Tahun 2021 dapat diselesaikan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas kebudayaan Kabupaten Bane Tahun 2021 berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun ketiga dalam masa RENSTRA Tahun 2018-2023 dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Dinas Kebudayaan Tahun 2021 yang merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta wujud pertanggung jawaban atas kinerja Dinas Kebudayaan bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan serta untuk meningkatkan kinerjanya yang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone Tahun 2021 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2022 dan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dalam meningkatkan kinerja serta penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang akan datang.

Watampone, Februari 2022

Kepala Dinas,



ANDI ANSAR AMAL, SH. M.Si

Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19620902 199203 1 005

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Umum	2
B. Organisasi	2
C. Sumber Daya Manusia	6
D. Isu Strategis.....	9
E. Aspek Strategis Organisasi	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
A. Tujuan dan Sasaran	13
B. Strategi dan Arah Kebijakan	14
C. Indikator Kinerja Utama	17
D. Perjanjian Kinerja	19
E. Standar Penilaian Kinerja	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
A. Capaian Kinerja Organisasi	21
B. Realisasi Anggaran	46
BAB IV PENUTUP.....	49
A. Simpulan Umum	49
B. Kendala Pelaksanaan dan Upaya Mengatasi.....	50

Lampiran :

- Matriks Renstra
- Cascading Kinerja
- Perjanjian Kinerja
- Ringkasan Pengukuran Kinerja
- Penghargaan
- Inovasi
- Lampiran lainnya, dll.



Bab I. PENDAHULUAN

A. Umum

B. Organisasi

C. Sumber Daya Manusia

D. Isu Strategis

E. Aspek Strategis Organisasi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Umum

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengarahkan bahwa terwujudnya suatu pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan Sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung, berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam upaya mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance).

Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Revisi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mencapai Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah yang baik Dinas Kebudayaan Kab.Bone melakukan pembenahan kinerja agar mampu meningkatkan peran serta fungsi dalam pengukuran Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan melalui Indikator Kinerja (Parameter) yang berupaya meningkatkan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah yang berorientasi kepada optimalisasi hasil yang akan dicapai demi kesejahteraan masyarakat dengan berdasarkan pada :

1. TAP MPR RI Nomor XI / MPR / 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas, Korupsi, Polisi dan Nepotisme.
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah .
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Organisasi

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan perangkat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone yang menyelenggarakan dan melaksanakan tugas – tugas dibidang Kebudayaan Daerah di Kabupaten Bone berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone yang dijabarkan melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 82 Tahun 2016 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, dan Kepala Seksi pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone.

1. **Tugas pokok :**

Menyelenggarakan Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang administrasi, Adat dan Tradisi, Sejarah dan Purbakala, Cagar Budaya, Permesiuman, Dokumentasi dan hubungan antar Lembaga serta promosi Budaya

2. **Fungsi :**

- a. Perumusan kebijakan dibidang Adat dan Tradisi, Sejarah dan Purbakala, Cagar Budaya, Permesiuman, Dokumentasi dan Hubungan antar Lembaga serta Promosi Budaya.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Adat dan Tradisi, Sejar dan purbakala, Cagar Budaya, Permesiuman, Dokumentasi dan hubungan antar Lembaga serta promosi Budaya.
- c. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan Pelestarian Adat dan Tradisi serta Kesenian
- d. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan dibidang Adat dan Tradisi, Sejarah dan Purbakala, Cagar Budaya, Permesiuman, Dokumentasi dan Hubungan antar Lembaga serta Promosi Budaya.
- e. Pemberian Rekomendasi dibidang Adat dan Tradisi, Sejarah dan Purbakala, Cagar Budaya, Permesiuman, Dokumentasi dan Hubungan antar Lembaga serta Promosi Budaya.
- f. Pelaksanaan Administrasi Penata Usahaan Dinas
- g. Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan Oleh Bupati

3. **Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Kab. Bone**

1. **Kepala Dinas**

2. **Sekretaris** terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Program
- c. Sub Bagian Keuangan

3. **Bidang Adat dan Tradisi** terdiri dari :

- a. Seksi Adat Istiadat
- b. Seksi Pembinaan Adat Istiadat
- c. Seksi Pembinaan Tradisi

4. **Bidang Sejarah dan Cagar Budaya** terdiri dari :

- a. Seksi Nilai Sejarah
- b. Seksi Pelestarian Cagar Budaya
- c. Seksi Permeseuman

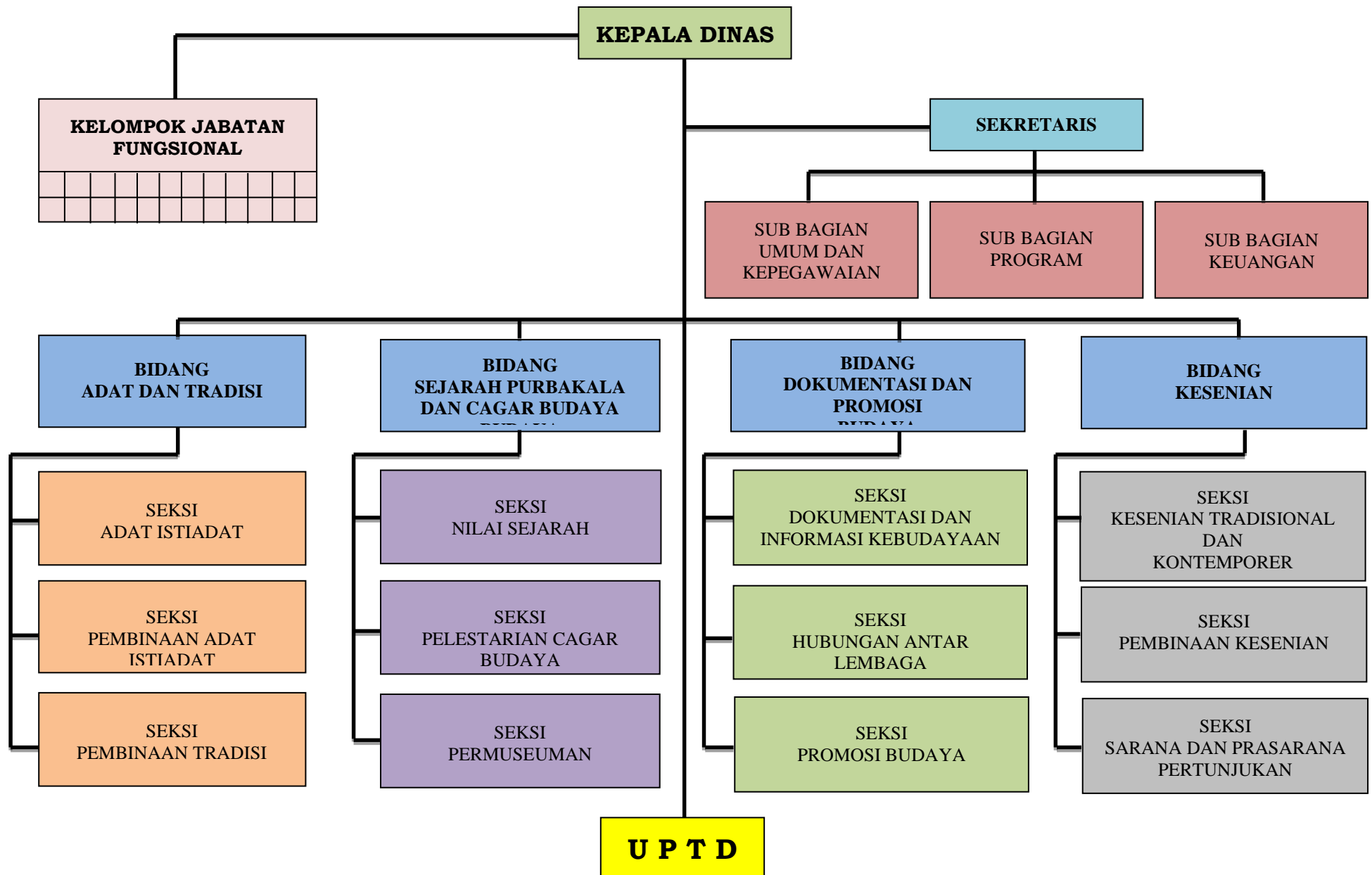
5. **Bidang Dokumentasi dan Promosi Budaya** terdiri dari :

- a. Seksi Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan
- b. Seksi Hubungan Antar Lembaga
- c. Seksi Promosi Budaya

6. **Bidang Kesenian** Terdiri dari :
 - a. Seksi Kesenian Tradisional dan Kontemporer
 - b. Seksi Pembinaan Kesenian
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Pertunjukan
7. **Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**
8. **Kelompok jabatan Fungsional**

Gambar 1 Personil Dinas Kebudayaan Kab. Bone





C. Sumber Daya Manusia

Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone selaku Pegawai Negeri Sipil sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) orang, dan pegawai tidak tetap sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) Orang, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas 1 (Satu) orang, sebagai Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
2. Sekretariat terdiri dari Sekretaris 1 (Satu) orang dibantu 3 (Tiga) orang Kepala Sub Bagian dan 1 (satu) orang Staf PNS selaku Bendahara Pengeluaran.
3. Bidang Adat dan Tradisi terdiri dari Kepala Bidang 1 (Satu) orang dibantu 1 (satu) orang Kepala Seksi (2Jabatan Kasi Lowong) dan 1 (satu) orang Staf Fungsional Umum.
4. Bidang Sejarah Purbakala dan Cagar Budaya terdiri dari Kepala Bidang 1 (Satu) orang dibantu 1 (satu) orang Kepala Seksi (2Jabatan Kasi Lowong) dan 1 (satu) orang Staf Fungsional Umum.
5. Bidang Dokumentasi dan Promosi Budaya terdiri dari Kepala Bidang 1 (Satu) orang dibantu Kepala Seksi 3 (Tiga) orang.
6. Bidang Kesenian terdiri dari Kepala Bidang 1 (Satu) orang dibantu 2 (Dua) orang Kepala Seksi dan 2 (Dua) orang Fungsional Umum.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) kosong.

Susunan Kepegawaian dan jumlah Personil di lingkup Dinas Kebudayaan kab. Bone berdasarkan Jenis kelamin, jenjang kepangkatan Pegawai, tingkat pendidikan dan jumlah tenaga Honorer/Pegawai tidak tetap dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai berdasarkan jenis Kelamin pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone sebagai berikut :

No	Jenis kelamin	Jumlah(Orang)		
		PNS	Kontrak	Total
1.	Laki – Laki	7	10	17
2.	Perempuan	14	16	30
	JUMLAH TOTAL	21	26	47

Sumber Data : DUK Dinas Kebudayaan Tahun 2021

Berdasarkan diagram diatas Jumlah ASN lingkup Dinas Kebudayaan Kab. Bone sejumlah 47 orang. Aparatur Sipil Negara pada masih didominasi oleh perempuan sebanyak 14 perempuan dan laki-laki sebanyak 7 orang. Demikian juga untuk Tenaga Honorer juga didominasi oleh perempuan sebanyak 16 perempuan dan laki-laki sebanyak 10 orang.

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Kepangkatan

No	Golongan Ruang	Jumlah		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
GOLONGAN IV				
1.	Golongan IV / d	-	-	-
2.	Golongan IV / c	1	-	1
3.	Golongan IV / b	-	1	1
4.	Golongan IV / a	2	2	4
GOLONGAN III				
1.	Golongan III / d	2	7	9
2.	Golongan III / c	1	2	3
3.	Golongan III / b	-	1	1
4.	Golongan III / a	-	1	1
GOLONGAN II				
1.	Golongan II / d	-	-	-
2.	Golongan II / c	-	-	-
3.	Golongan II / b	1	-	1
4.	Golongan II / a	-	-	-
	JUMLAH TOTAL	7	14	21

Sumber Data : DUK Dinas Kebudayaan Tahun 2021

Tabel 1.3

Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah(Orang)		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	Strata II (S2)	4	4	8
2.	Strata I (S1)	1	10	11
3.	Sarjana Muda (D3)	1	-	1
4.	SLTA Sederajat	1	-	1
JUMLAH TOTAL		7	14	21

Sumber Data : DUK Dinas Kebudayaan Tahun 2021

Tabel 1.4

Jumlah Tenaga honorer / Pegawai Tidak Tetap

No	Tenaga Honorer / PTT	Jumlah (Orang)		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	Operator Komputer	5	6	15
2.	Tenaga Administrasi	5	10	11
JUMLAH TOTAL		10	16	26

Sumber Data : DUK Dinas Kebudayaan Tahun 2021

Dengan melihat sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia yang di hadapi Dinas kebudayaan Kab. Bone terdapat permasalahan utama (Strategic Issued) :

- Terbatasnya dana untuk pengembangan Sumber daya Aparatur untuk Pengembangan Kebudayaan
- Masih terbatasnya Sarana dan Prasarana serta fasilitas dalam mendukung Seni dan Budaya
- Masih rendahnya pemeliharaan benda situs dan kawasan CagarBudaya yang di Lestarkan
- Masih terbatasnya kegiatan pelestarian Nilai – nilai Budaya dan kearifan lokal sebagai aset Budaya Bangsa.
- Masih terbatasnya pengetahuan yang dimiliki petugas Cagar Budaya.

- f. Masih terbatasnya data yang akurat baik organisasi kesenian maupun situs cagar budaya baik yang dilestarikan dan dikelola di daerah Kabupaten Bone.

D. Isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis berdasarkan peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta visi misi sebagai lembaga yang bertugas terhadap kebudayaan seperti diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kebudayaan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar untuk menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan adalah sebagai berikut:

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sarana Pembangunan Daerah

NO	MASALAH	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
1	Penempatan ASN tidak sesuai dengan kompetensi/kwalifikasi pendidikan	Masih rendahnya kualitas SDM di sector kebudayaan	Masih kurangnya kepedulian terhadap seni budaya daerah yang perlu dilestarikan
2	Kurangnya dukungan masyarakat terhadap kelestarian cagar budaya	Belum terjaganya dan terawatnya pelestarian cagar budaya	Belum memadainya inventarisasi jumlah situs dan kawasan cagar budaya karena belum adanya kerjasama dengan balai pelestarian cagar budaya (BPCB) Provinsi Sulawesi Selatan yang melaksanakan pengkajian penetapan situs
3	Kurangnya dukungan masyarakat dalam pelestarian warisan adat budaya daerah	Masih rendahnya minat untuk mengetahui dan memahami warisan adat budaya daerah	Masih minimnya data yang akurat dan inventarisasi karya budaya
4	Perlu pembinaan yang maksimal agar Dinas Kebudayaan khususnya dibidang kesenian	Belum meratanya kesenian dimasyarakat/di level bawah	Perlu adanya data akurat terkait nama sanggar seni yang ada dimasyarakat
5	Perlu adanya peningkatan koordinasi dinas	Belum maksimalnya tumbuh kembang kesenian tradisional	Perlunya adanya pemajuan data yang akurat tentang kesenian tradisional

	terkait (Kebudayaan) dengan pemangku kebutuhan di masyarakat	dimasyarakat baik perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan obyek pemajuan tradisi budaya	
--	--	--	--

- Penempatan ASN tidak sesuai dengan kompetensi /kualifikasi Pendidikan sehingga kurangnya minat dan pengelolaan ASN terhadap sektor Kebudayaan maka perlu diadakan bimbingan dan pelatihan teknis guna meningkatkan kualitas SDM disektor Kebudayaan.
- Situs dan Cagar Budaya di Kabupaten Bone masih perlu dukungan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga, merawat dan melestarikannya. Dibutuhkan tenaga ahli yang kompeten dan mengkaji situs dan Cagar Budaya yang ada.
- Warisan Adat Budaya Daerah Kabupaten Bone begitu beragam, namun kurangnya kepedulian dan dukungan masyarakat, untuk menguak Warisan yang ada, disamping itu luasnya wilayah Kabupaten Bone dengan 27 Kecamatan yang sulit dijangkau seluruhnya, sehingga kurang maksimalnya dalam memperoleh data Warisan Adat Budaya.
- Kesenian tradisional yang dimiliki masyarakat Kabupaten Bone sangat beragam, namun hanya ditampilkan dilingkungan/lokasi masyarakat itu sendiri kurangnya promosi, pengembangan dan pemajuan kesenian tersebut maka perlunya koordinasi dengan pihak terkait sehingga pemajuan kesenian tradisional tersebut bias berkembang dan dikawal semua kalangan baik internal maupun eksternal.

E. Aspek Strategis Organisasi

Penyusunan rencana strategis sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 5 (lima) tahun yang meliputi pernyataan Visi Misi tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja yang di tuangkan dalam Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah mengacu kepada RPJMD Dinas Kebudayaan Kab. Bone.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran Visi dan Misi yang telah ditetapkan melalui rencana kinerja yang di tetapkan melalui target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja sebagai sasaran bagi seluruh komponen Instansi pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Adapun Visi Misi tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Kebudayaan Kab. Bone yang tercantum dalam (RENSTRA) Dinas kebudayaan Kab. Bone tahun 2018 –2023 sebagai berikut :

a. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Pemerintahan Kabupaten Bone sebagai berikut :

“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera”

Misi

- a. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
- b. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat

b. Tujuan

Tujuan jangka menengah Dinas Kebudayaan Kab. Bone adalah

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan kebudayaan
2. Menjaga kelestarian cagar budaya daerah dan warisan budaya daerah
3. Meningkatkan pengakuan nasional terhadap karya budaya daerah

c. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dalam rencana strategis ini adalah

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan kebudayaan
2. Terjaganya kelestarian cagar budaya daerah
3. Terjaganya kelestarian warisan budaya daerah
4. Meningkatnya pengakuan Nasional terhadap karya budaya daerah

d. Strategi

Strategi pengembangan dan Pembangunan Kebudayaan Kab. Bone adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas kelembangan dan layanan aparatur dalam mendukung kinerja urusan kebudayaan yang akuntabel
2. Menjaga kelestarian cagar budaya untuk menjadikan ikon promosi budaya
3. Menjaga kelestarian warisan budaya untuk menjadikan ikon promosi Budaya
4. Peningkatan pengakuan nasional warisan budaya yang tak benda.

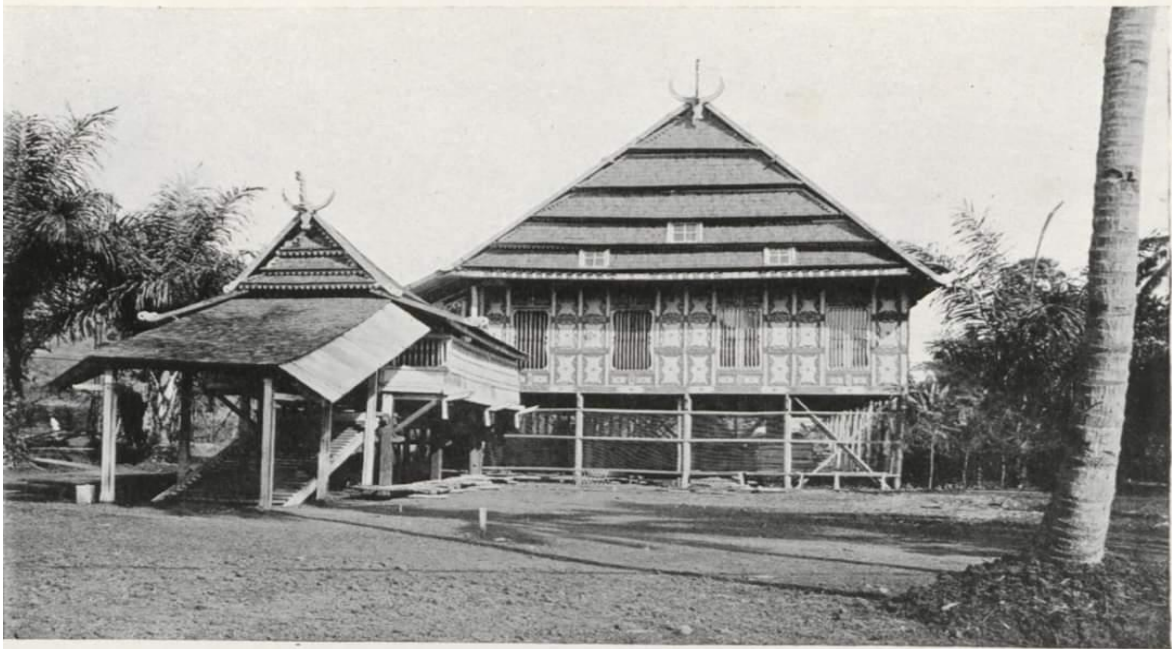
e. Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pengembangan Kebudayaan Kab.Bone, Memerlukan suatu kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan pengembangan Kebudayaan di Kab.Bone. Kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai.
2. Pelestarian cagar budaya sebagai kekayaan budaya daerah.

3. Pelestarian warisan budaya bone untuk dikenal oleh masyarakat luas
4. Penyediaan bahan kajian untuk mendapatkan pengakuan karya budaya

Gambar : Saoraja Arumpone sebelum Rumpakna Bone (sekarang Gedung Perpustakaan Daerah Bola Subbi-E)



Sumber : Koleksi NKTL, Belanda



Sumber : Koleksi NKTL, Belanda



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan dan Sasaran

Pernyataan tujuan dan target Jangka Menengah Dinas Kebudayaan Kab. Bone beserta indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra 2018-2023

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan	Predikat evaluasi SAKIP oleh APIP	B	B	B	BB	A

Meningkatkan Pengakuan Nasional Terhadap Karya Budaya Daerah	Persentase Karya Budaya Daerah yang diakui Secara Nasional (%)	80	83	80	85	90
Melestarikan Cagar Budaya Daerah dan Warisan Budaya Daerah	Persentase Warisan Budaya Daerah yang dilestarikan (%)	75	80	85	90	95
	Persentase Cagar Budaya Daerah yang dilestarikan (%)	18	22	80	85	90

Sumber Data: Renstra Perubahan 2018-2023 Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone.

B. Strategi dan Arah Kebijakan

1. Strategi

Rumusan strategis merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Perangkat Daerah menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategiter sebut menciptakan nilai. Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan Pemerintah Daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi.

Dalam rangka mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2018-2023, maka Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone merumuskan Strategi sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Layanan Aparatur dalam mendukung kinerja perangkat daerah yang akuntabel.

- b. Menjaga kelestarian cagar budaya untuk menjadikan ikon
- c. Menjaga kelestarian warisan budaya untuk menjadikan ikon promosi Budaya
- d. Peningkatan pengakuan nasional warisan budaya tak benda

2. Arah Kebijakan

Dalam rangka mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2018-2023, maka Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone merumuskan Kebijakanse sebagai berikut:

- a. Penyediaan Sarana dan PrasaranaAparatur yang memadai
- b. Pelestarian cagar budaya sebagai kekayaan budaya daerah
- c. Pelestarian warisan budaya Bone untuk dikenal oleh masyarakat luar
- d. Penyediaan bahan kajian untuk mendapatkan karya budaya

TABEL 2.2 TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS, dan ARAH KEBIJAKAN

VISI : MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA			
MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Layanan Aparatur dalam mendukung Kinerja Dinas Kebudayaan yang akuntabel	Penyediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai
MISI 6 : Meningkatkan Budaya Politik, Penegakan Hukum, dan Seni Budaya dalam Kemajemukan Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pengakuan nasional terhadap karya budaya daerah	Meningkatnya Pengakuan Nasional terhadap karya budaya daerah	Peningkatan pengakuan nasional warisan budaya yang tak benda	Penyediaan bahan kajian untuk mendapatkan pengakuan karya budaya
Melestarikan kelestarian cagar budaya daerah dan warisan budaya daerah	Terpeliharanya warisan budaya daerah	Menjaga kelestarian warisan budaya untuk menjadikan ikon promosi budaya	Pelestarian warisan budaya bone untuk dikenal oleh masyarakat luas
	Terlestarikannya Cagar Budaya Daerah	Menjaga Kelestarian cagar budaya untuk menjadikan ikon promosi budaya	Pelestarian cagar budaya sebagai kekayaan budaya daerah

Sumber Data : Renstra Perubahan Dinas Kebudayaan 2018-2023

C. Indikator Kinerja Utama

IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone.

Tabel. 2.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1.	Meningkatnya Pengakuan Nasional Terhadap Karya Budaya Daerah	Persentase Karya Budaya Daerah yang diakui Secara Nasional (%)	$\frac{\text{Jumlah Karya Budaya yang diakui}}{\text{Jumlah Karya Budaya yang di Targetkan}} \times 100\%$	Rekap Data Karya budaya	1. Bidang Promosi dan Dokumentasi 2. Bidang Adat dan Tradisi
2.	Terpeliharanya Warisan Budaya Daerah	Persentase Warisan Budaya Daerah yang dilestarikan (%)	$\frac{\text{Jumlah Warisan Adat Budaya Daerah yang Dilestarikan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Warisan Budaya}} \times 100\%$	Rekap Data Warisan Budaya	1. Bidang Adat dan Tradisi 2. Bidang Kesenian
3.	Terlestarikannya Cagar Budaya Daerah	Persentase Cagar Budaya Daerah yang dilestarikan (%)	$\frac{\text{Jumlah Cagar Budaya Daerah yang Dilestarikan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Cagar Budaya}} \times 100\%$	Rekap Data Cagar Budaya	Bidang Sejarah dan Purbakala
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan Berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bone	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi SAKIP Oleh APIP	Sekretariat

Sumber data : Perbup IKU Tahun 2021

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disepakati bersama antara penerima dan pemberi amanah dan merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Tahun 2021

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan	Predikat evaluasi SAKIP oleh APIP	BB	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.014.598.214
Meningkatkan Pengakuan Nasional Terhadap Karya Budaya Daerah	Persentase Karya Budaya Daerah yang diakui Secara Nasional (%)	85	Program Pengembangan Kebudayaan	148.240.000
Melestarikan Cagar Budaya Daerah dan Warisan Budaya Daerah	Persentase Warisan Budaya Daerah yang dilestarikan (%)	85	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	32.500.000
			Program Pembinaan Sejarah	253.890.000
	Persentase Cagar Budaya Daerah yang dilestarikan (%)	26	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	818.000.000
			Program	656.000.000

			Pengelolaan Permuseuman	
Jumlah				4.923.228.214

E. Standar Penilaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Standar penilaian kinerja terhadap laporan kinerja perangkat daerah merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Kebudayaan Kab.Bone maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5 Standar Penilaian Kinerja

Nilai %	Pencapaian
110 ke atas	Sangat tercapai/Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai/Tidak berhasil

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$



Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Dinas Kebudayaan menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Kebudayaan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Kebudayaan

Pengukuran kinerja Dinas Kebudayaan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja setiap indikator tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Capaian indikator kinerja tujuan/sasaran atas perjanjian kinerja di atas mengacu pada tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan meliputi:

Tujuan/Sasaran 1:

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan.
dengan indikator:

⇒ Predikat evaluasi SAKIP oleh APIP

Tujuan/Sasaran 2:

Meningkatnya Pengakuan Nasional Terhadap Karya Budaya Daerah.

dengan indikator:

⇒ Persentase Karya Budaya Daerah yang diakui Secara Nasional.

Tujuan/Sasaran 3:

Terpeliharanya Warisan Budaya Daerah.

dengan indikator:

⇒ Persentase Warisan Budaya Daerah yang dilestarikan.

⇒ Persentase Cagar Budaya Daerah yang dilestarikan

Untuk setiap pernyataan kinerja tujuan/sasaran strategis tersebut di atas dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2021 sebagai berikut:

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Capaian kinerja tahun anggaran 2021 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2021 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

NO	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Keterangan
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan	Predikat evaluasi SAKIP oleh APIP	B	B	100	Berhasil
2	Meningkatnya Pengakuan Nasional Terhadap	Persentase Karya Budaya Daerah	80	100	125	Sangat Berhasil

	Karya Budaya Daerah	yang diakui Secara Nasional (%)				
3	Terpeliharanya Warisan Budaya Daerah	Persentase Warisan Budaya Daerah yang dilestarikan (%)	85	100	117	Sangat Berhasil
4	Terlestarikannya Cagar Budaya Daerah	Persentase Cagar Budaya Daerah yang dilestarikan (%)	80	100	125	Sangat Berhasil
	Rata-rata				117,25%	Berhasil

Sumber data :Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kebudayaan 2021

Berdasarkan table diatas rata-rata capaian indikator kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone untuk Tahun 2021 yaitu 106,5 % dengan Kategori Berhasil.Untuk Sasaran 1, 2 dan 4 dengan Kategori Berhasil sedangkan sasaran 3 dengan Kategori Sangat Berhasil.

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan 2018 – 2023. Adapun realisasi dan capaian kinerja Dinas Kebudayaan apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matrik sebagai berikut:

Tabel 3.2 Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023

No	Tujuan/ Strategis	Sasaran	Indikator Kinerja	Data Awal 2018	Realisasi Kinerja			Capaian Kinerja		
					2019	2020	2021	2019	2020	2021
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan		Predikat evaluasi SAKIP oleh APIP	CC	B	B	B	100	100	100
2.	Meningkatnya Pengakuan Nasional Terhadap Karya Budaya Daerah		Persentase Karya Budaya Daerah yang diakui Secara Nasional (%)	75	80	83	100	100	100	125
3.	Terpeliharanya Warisan Budaya Daerah		Persentase Warisan Budaya Daerah yang dilestarikan (%)	70	75	80	100	100	100	117
4.	Terlestarikannya Cagar Budaya Daerah		Persentase Cagar Budaya Daerah yang dilestarikan (%)	12	18	22	100	100	100	125

Sumber Data: Renstra Perubahan 2018-2023

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa realisasi dan capaian kinerja Dinas Kebudayaan terhadap 4 (empat) sasaran strategis yang mencakup 4 (empat) Indikator Sasaran, dapat diketahui bahwa secara umum Realisasi Kinerja dari Tahun 2019 s.d 2021 terus mengalami kenaikan dengan penjelasan sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan**Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan****Indikator : Predikat evaluasi SAKIP oleh APIP**

Realisasi Kinerja Tahun 2019, 2020 dan 2021 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan data awal (predikat CC) dan melampaui target kinerja yang diperjanjikan namun menunjukkan **kecenderungan yang tetap** (pada predikat B) dari Tahun 2019, 2020 sampai 2021.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019, 2020 dan 2021 juga menunjukkan kecenderungan tetap pada kategori **berhasil**(100%).

Tujuan 2 : Meningkatkan Pengakuan Nasional Terhadap Karya Budaya Daerah**Sasaran 2 : Meningkatnya Pengakuan Nasional Terhadap Karya Budaya Daerah****Indikator 2: Persentase Karya Budaya Daerah yang diakui Secara Nasional**

Realisasi Kinerja Tahun 2019, 2020 dan 2021 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan data awal(75%) dan melampaui target kinerja yang diperjanjikan serta menunjukkan **kecenderungan yang terus naik** dari Tahun 2019, 2020 sampai 2021 (100%).

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019, 2020 dan 2021 menunjukkan kecenderungan terus naik hingga pada Capaian 125% pada Tahun 2021.

Tujuan 3 : Menjaga Kelestarian Cagar Budaya daerah dan Warisan Budaya Daerah**Sasaran 3.1 : Terpeliharanya Warisan Budaya Daerah****Indikator 3.1 : Persentase Warisan Budaya Daerah yang dilestarikan**

Realisasi Kinerja Tahun 2019, 2020 dan 2021 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan data awal (70%) dan melampaui target kinerja yang diperjanjikan serta menunjukkan **kecenderungan yang terus naik** dari Tahun 2019, 2020 sampai 2021 (100%).

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019, 2020 dan 2021 menunjukkan kecenderungan terus naik hingga pada Capaian 117% pada Tahun 2021.

Sasaran 3.2 : Terlestarikannya Cagar Budaya Daerah

Indikator 3.2 : Persentase Cagar Budaya Daerah yang dilestarikan

Realisasi Kinerja Tahun 2019, 2020 dan 2021 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan data awal (12%) dan melampaui target kinerja yang diperjanjikan serta menunjukkan **kecenderungan yang terus naik** dari Tahun 2019, 2020 sampai 2021 (100%).

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019, 2020 dan 2021 menunjukkan kecenderungan terus naik hingga pada Capaian 125% pada Tahun 2021.

Gambar 1.5 Dokumentasi Penerimaan Penghargaan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Memuaskan.



3. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Tahun 2018 – 2023 seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Jangka Menengah Renstra 2018 -2023

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan	Predikat evaluasi SAKIP oleh APIP	A	B	B	B	-	-
Meningkatnya Pengakuan Nasional Terhadap KaryaBudaya Daerah	Persentase Karya Budaya Daerah yang diakui Secara Nasional (%)	90	80	83	100	-	-
Terpeliharanya Warisan Budaya Daerah	Persentase Warisan Budaya Daerah	95	75	80	100	-	-

	yang dilestarikan (%)						
Terlestarikannya Cagar Budaya Daerah	Persentase Cagar Budaya Daerah yang dilestarikan (%)	90	18	22	100	-	-

Sumber Data: Renstra Perubahan Dinas Kebudayaan Tahun 2018 - 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021 secara umum masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Target Jangka Menengah pada Renstra Perubahan 2018-2023, dengan penjelasan sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan

Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan

Indikator : Predikat evaluasi SAKIP oleh APIP

Target Jangka Menengah pada Renstra sebesar A dan **terrealisasi lebih rendah** pada Tahun 2021 dengan Predikat B.

Tujuan 2 : Meningkatkan Pengakuan Nasional Terhadap Karya Budaya Daerah

Sasaran 2 : Meningkatnya Pengakuan Nasional Terhadap Karya Budaya Daerah

Indikator 2 : Persentase Karya Budaya Daerah yang diakui Secara Nasional

Target Jangka Menengah pada Renstra sebesar 90% dan **terrealisasi melebihi target** di tahun 2021 sebesar 100%.

Tujuan 3 : Menjaga Kelestarian Cagar Budaya daerah dan Warisan Budaya Daerah

Sasaran 3.1 : Terpeliharanya Warisan Budaya Daerah

Indikator 3.1 : Persentase Warisan Budaya Daerah yang dilestarikan

Target Jangka Menengah pada Renstra sebesar 95% dan **terrealisasi lebih tinggi** dari target di tahun 2021 sebesar 100%.

Sasaran 3.2 : Terlestarikannya Cagar Budaya Daerah

Indikator 3.2 : Persentase Cagar Budaya Daerah yang dilestarikan

Target Jangka Menengah pada Renstra sebesar 90% dan **terrealisasi lebih tinggi** dari target di tahun 2021 sebesar 100%.

Gambar : Pendataan Status Cagar Budaya pada Makam We Mappolobombang yg memiliki nisan type Aceh di Kec. Cenrana



Sumber : koleksi pribadi

4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

Dinas Kebudayaan melaksanakan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Sehingga tidak termasuk perangkat daerah yang wajib menerapkan standar Pelayanan Minimal.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran strategis kita lihat tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel. 3.4 Ikhtisar Pencapaian Capaian Kinerja

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Rata-rata Capaian	Predikat			
					>110	90=< s/d< 110	60=< s/d< 90	<60
					Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan	Predikat evaluasi SAKIP oleh APIP	100	100	√ ✓			
2	Meningkatnya Pengakuan Nasional Terhadap Karya Budaya Daerah	Persentase Karya Budaya Daerah yang diakui Secara Nasional (%)	125	125	√ ✓			
3.	Terpeliharanya Warisan Budaya Daerah	Persentase Warisan Budaya Daerah yang dilestarikan (%)	117	121	√ ✓			
4.	Terlestarikannya Cagar Budaya Daerah	Persentase Cagar Budaya Daerah yang dilestarikan (%)	125		√			

Berdasarkan data pada tabel 3.4 diatas, dapat disimpulkan bahwasecara umum realisasi capaian indikator tujuan/sasaran strategis Dinas Kebudayaan Tahun 2021 dalam kategori **Sangat Berhasil.**

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut:

Tujuan 1	: Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan
Sasaran 1	: Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan
Indikator	: Predikat evaluasi SAKIP oleh APIP

Dari tabel 3.4 di atas, terlihat bahwa pencapaian tujuan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan dengan indikator Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP mendapatkan predikat **Berhasil** yang mempunyai nilai capaian rata-rata 100% yang didukung oleh 1(satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja.

Pencapaian di atas telah mencapai target namun masih terdapat hambatan dalam pencapaian yang lebih maksimal yakni dalam tahap evaluasi internal yang dilakukan Dinas Kebudayaan belum optimal.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan adalah :

- Melaksanakan rapat kerja dalam penyusunan dokumen perencanaan
- Melakukan sinkronisasi program kegiatan dan sub kegiatan
- Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja fisik dan keuangan setiap triwulan
- Melaksanakan langkah langkah preventif dalam pencapaian kinerja

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

- Indikator Kinerja Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa capaian indikator Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP dalam kategori sangat berhasil, yaitu tercapai 72,85 dari target 50, hal ini disebabkan oleh :
 - a. Adanya dukungan penerapan akuntabilitas yang sudah memadai dari hasil penyusunan dokumen serta kelengkapan data pendukung.
 - b. Telah melakukan evaluasi internal
 - c. Telah melakukan rapat – rapat internal Dinas Kebudayaan Pencapaian di atas telah melampaui target, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain :
 - a. Belum memadainya dokumen pendukung dalam penerapan akuntabilitas kinerja
 - b. Belum optimalnya monitoring evaluasi
 - c. Belum maksimalnya langkah – langkah preventif dalam pencapaian kinerja

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan untuk meningkatkan kinerja dalam rangka pencapaian tujuan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan, antara lain :

- a. Peningkatan sumber daya aparatur
- b. Pemanfaatan sarana dan prasarana
- c. Pelaksanaan kegiatan yang optimal sebagaimana tertuang dalam dokumen Pelaksanaan anggaran
- d. Evaluasi program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi

Tujuan 2 : Meningkatkan Pengakuan Nasional Terhadap Karya Budaya Daerah

Sasaran 2 : Meningkatnya Pengakuan Nasional Terhadap Karya Budaya Daerah

Indikator 2: Persentase Karya Budaya Daerah yang diakui Secara Nasional

Dari tabel di atas, terlihat bahwa pencapaian tujuan Meningkatkan Pengakuan Nasional Terhadap Karya Budaya Daerah pada Dinas Kebudayaan dengan indikator Persentase Karya Budaya Daerah yang diakui Secara Nasional mendapatkan predikat **Sangat Berhasil** yang mempunyai nilai capaian rata-rata 125% yang didukung oleh 1(satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja.

Tujuan 3 : Menjaga Kelestarian Cagar Budaya daerah dan Warisan Budaya Daerah

Sasaran 3.1 : Terpeliharanya Warisan Budaya Daerah

Indikator 3.1 : Persentase Warisan Budaya Daerah yang dilestarikan

Sasaran 3.2 : Terlestarikannya Cagar Budaya Daerah

Indikator 3.2 : Persentase Cagar Budaya Daerah yang dilestarikan

Dari tabel 3.4 di atas, terlihat bahwa pencapaian tujuan Menjaga Kelestarian Cagar Budaya daerah dan Warisan Budaya Daerah Dinas Kebudayaan dengan indikator Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP mendapatkan predikat **Sangat Berhasil** yang mempunyai nilai capaian rata-rata 121% yang didukung oleh 2(dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja.

Pencapaian di atas telah mencapai target namun masih terdapat hambatan dalam pencapaian yang lebih maksimal yakni dalam tahap evaluasi internal yang dilakukan Dinas Kebudayaan belum optimal.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan adalah :

- a. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat teknis pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan,
- c. Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja fisik dan keuangan setiap triwulan
- d. Melaksanakan langkah langkah preventif dalam pencapaian kinerja

Berberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

- Indikator Kinerja Persentase Warisan Budaya Daerah yang dilestarikan Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa capaian indikator dalam kategori sangat berhasil, yaitu tercapai 117% dari target 80, hal ini disebabkan oleh :
 - d. Adanya dukungan tim yang solid.
 - e. Telah melakukan evaluasi internal
 - f. Telah melakukan rapat – rapat internal Dinas Kebudayaan
- Pencapaian di atas telah melampaui target, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain :
- a. Belum memadainya dokumen pendataan warisan budaya yang diduga Cagar Budaya
 - b. Belum optimalnya pendataan di lapangan terkait kurangnya Sumber Daya Aparatur yang kompeten
 - c. Belum maksimalnya langkah – langkah preventif dalam pencapaian kinerja

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan untuk meningkatkan kinerja dalam rangka pencapaian tujuan meningkatkan Warisan Budaya Daerah yang dilestarikan, antara lain :

- a. Peningkatan sumber daya aparatur
- b. Pemanfaatan sarana dan prasarana
- c. Pelaksanaan kegiatan yang optimal sebagaimana tertuang dalam dokumen Pelaksanaan anggaran

- d. Evaluasi program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi

Gambar : Pendataan dan Inventarisasi Objek diduga Cagar Budaya



Sumber : Koleksi pribadi

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Dinas kebudayaan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Dinas kebudayaan adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2021 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Dinas kebudayaan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan:

Tabel 3.5 Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tujuan/ Strategis	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi Sumber Daya %
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu(Rp)	Realisasi(Rp)	Capaian (%)	
a	B	C	d	e ((d/c) x100%)	F	G	h (g/f x 100%)	i (e-h)	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan	Predikat evaluasi SAKIP oleh APIP	B	B	100	3.935.160.129	2.892.494.173	73,505	26,496	
Meningkatnya Pengakuan Nasional Terhadap KaryaBudaya Daerah	Persentase Karya Budaya Daerah yang diakui Secara Nasional (%)	80	100	125	148.240.000	132.857.000	89,623	35,377	
Terpeliharanya Warisan Budaya Daerah	Persentase Warisan Budaya Daerah yang dilestarikan (%)	85	100	117	286.390.000	286.389.000	99,9996	17,0004	
Terlestarikannya Cagar Budaya Daerah	Persentase Cagar Budaya Daerah yang dilestarikan (%)	80	100	125	1.474.000.000	1.471.899.000	99,8575	25,1425	

Sumber Data: Laporan Capaian Kinerja dan realiasi anggaran Program Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan kegiatan Dinas Kebudayaan terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu:

1. Indikator 1 Predikat evaluasi SAKIP oleh APIP dengan capaian kinerja 100 % dan capaian anggaran 73,505%, menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 26,496%.
2. Indikator 2 Persentase Karya Budaya Daerah yang diakui Secara Nasional dengan capaian kinerja 125 % dan capaian anggaran 89,623%, menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 35,377%.
3. Indikator 3 Persentase Warisan Budaya Daerah yang dilestarikan dengan capaian kinerja 117 % dan capaian anggaran 99,9996%, menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 17,0004%.
4. Indikator 4 Persentase Cagar Budaya Daerah yang dilestarikan dengan capaian kinerja 104 % dan capaian anggaran 99,8575%, menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 25,1425%.

7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis terhadap program/kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan pada Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6 Analisis Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan								
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan	Predikat evaluasi SAKIP oleh APIP						100	
			Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase rata-rata capaian kinerja indikator program teknis perangkat daerah	192	192	100	
			Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat daerah yang tersusun	19	19	100	
			Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	2	2	100	
			Koordinasi dan	Jumlah dokumen	1	1	100	
			Penyusunan dokumen perubahan rka-skipd	Perubahan rka skipd yang disusun				
			Koordinasi dan penyusunan dpa-	Jumlah dokumen dpa-skipd yang disusun	1	1	100	

			skpd				
			Koodinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Skpd	Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi skpd	10	10	100
			Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah	5	5	100
			Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	12	12	100
			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah laporan realisasi gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	12	12	100
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	124	124	100
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	12	12	100
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	3	3	100
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Tersedia	10	10	100
			Penyediaan	Jumlah Barang	12	12	100

			BarangCetakan danPenggandaan	Cetakandan Penggandaan yangTersedia				
			Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPerundang- Undangan	Jumlah Bahan Bacaandan Peraturan PerundangUndangan	12	12	100	
			Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD	Jumlah laporan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPDyang Dilaksanakan	75	75	100	
			PengadaanBarangMilikD aerah PenunjangUrusan PemerintahDaerah	Jumlah LaporanPengadaanBa rangMilikDaerah Sesuai RencanaKebutuhan PenunjangUrusan PemerintahDaerah	10	10	100	
			Pengadaan Peralatan danMesinLainnya	JumlahPengadaan Peralatan dan MesinLainnya	10	10	100	
			Penyediaan JasaPenunjang UrusanPemerintahanDae rah	JumlahLaporanHasi lPelaksanaan PenyediaanJasa	24	24	100	
			Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDayaAirdanListri k	Jumlah tagihan mobilephone pasca bayar yangdibayarkan	12	12	100	
			Penyediaan JasaPelayananUmumKa ntor	Jumlah laporan realisasijasa pegawai yangmenerima honoradministrasikeu angan	12	12	100	

			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penu- njang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penu- njang Urusan Pem- erintahan Daerah	3	3	100	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau K endaraan Dinas Jabatan	Jumlah laporan pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Pajak Kendaraan dinas yang dibayarkan	3	3	100	
Meningkatnya Pengakuan Nasional Terhadap Karya Budaya Daerah								
Meningkatkan Pengakuan Nasional Terhadap Karya Budaya Daerah	Persentase Karya Budaya Daerah yang diakui Secara Nasional (%)				13	13	100	
			Program pengembangan kebudayaan	Persentase pengemba- ngan kebudayaan	13	13	100	
			Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	Cakupan pelestarian kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	13	13	100	

			Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	Jumlah laporan pelaksanaan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	3	3	100	
			Pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata tradisional	Jumlah laporan penjemputan tamu secara adat dan pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata tradisional	10	10	100	
Melestarikan Cagar Budaya Daerah dan Warisan Budaya Daerah								
Terpeliharanya Warisan Budaya Daerah	Persentase Warisan Budaya Daerah yang dilestarikan (%)				6	6	100	
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Proses pengembangan kesenian tradisional	5	5	100	
			Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	Cakupan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	5	5	100	
			Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional	Jumlah sdm, lembaga dan pranata yang dibangun (peningkatan kompetensi, standar)	5	5	100	

				asi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola				
			Program Pembinaan Sejarah	Prosentase pembinaan sejarah	1	1	100	
			Pembinaan sejarah lokal dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah pembinaan sejarah lokal dalam daerah kabupaten/kota	1	1	100	
			Peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah	Jumlah laporan pelaksanaan peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah	1	1	100	
Terlestarikannya Cagar Budaya Daerah	Persentase Cagar Budaya Daerah yang dilestarikan (%)				12	12	100	
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase pelestarian pengelolaan cagar budaya	7	7	100	
			Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota	Jumlah penetapan cagar budaya peringkat kabupaten	7	7	100	
			Pendaftaran objek diduga cagar budaya	Jumlah tim pendaftaran Cagar budaya yang dibentuk	7	7	100	
			Program pengelolaan permesiuman	Persentase pengelolaan permesiuman	5	5	100	
			Pengelolaan museum kabupaten/kota	Jumlah laporan pengelolaan museum kabupaten/kota yang dikelola	5	5	100	



			Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum	Jumlah pengelolaan, pengamatan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	5	5	100	
--	--	--	---	---	---	---	-----	--

Sumber Data: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Kebudayaan tahun 2021

Berdasarkan tabel 3.6 di atas, tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan

Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan

Indikator : Predikat evaluasi SAKIP oleh APIP

Dengan target B telah **Berhasil** mencapai Realisasi Kinerja dengan Kriteria B atau Capaian Kinerja sebesar 100%.

Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

- Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kab./Kota

Tujuan 2 : Meningkatkan Pengakuan Nasional Terhadap Karya Budaya Daerah

Sasaran 2 : Meningkatnya Pengakuan Nasional Terhadap Karya Budaya Daerah

Indikator 2 : Persentase Karya Budaya Daerah yang diakui Secara Nasional

Dengan target 80% telah **Berhasil** tercapai Realisasi Kinerja sebesar 100% atau Capaian Kinerja sebesar 125%.

Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

- Pengembangan Kebudayaan

Tujuan 3 : Menjaga Kelestarian Cagar Budaya daerah dan Warisan Budaya Daerah

Sasaran 3.1 : Terpeliharanya Warisan Budaya Daerah

Indikator 3.1 : Persentase Warisan Budaya Daerah yang dilestarikan

Dengan target 85% telah **Berhasil** tercapai Realisasi Kinerja sebesar 100% atau Capaian Kinerja sebesar 117%.

Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

- Pengembangan Kesenian Tradisional
- Pembinaan sejarah

Sasaran 3.2 : Terlestarikannya Cagar Budaya Daerah**Indikator 3.2 : Persentase Cagar Budaya Daerah yang dilestarikan**

Dengan target 80% telah **Berhasil** tercapai Realisasi Kinerja sebesar 100% atau Capaian Kinerja sebesar 125%.

Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

- Pelestarian dan Pengelolaan cagar Budaya
- Pengelolaan Permuseuman

Upaya Perbaikan :

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan pada tahun 2021 dengan melalui 7 analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya, yaitu:

1. Mengupayakan peningkatan, pengembangan dan memperluas suatu kegiatan yang dilaksanakan agar mencapai sasaran yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tiap program dan kegiatan dan mengidentifikasi agar tepat sasaran.
3. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai umpan balik penyempurnaan program-program dan kegiatan.
4. Program dan kegiatan agar memenuhi komponen dan indikator program, baik komponen output dan komponen outcome.

B. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran belanja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone Tahun 2021 setelah perubahan sebesar **Rp. 5.180.578.129,-** (*Lima Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Dua Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*) dan terealisasi sebesar **Rp. 4. 783.639.173,-** (*Empat Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga*

Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran

Uraian	Jumlah (Rp)		%
	Anggaran	Realisasi	
Tujuan/Sasaran 1:Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan			
• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.271.948.129	2.892.494.173	88,40
Tujuan/Sasaran 2:Meningkatnya Pengakuan Nasional Terhadap Karya Budaya Daerah			
• Program Pengembangan Kebudayaan	148.240.000	132.857.000	89,62
Tujuan/Sasaran 3: Melestararikan Cagar Budaya Daerah dan Warisan Budaya Daerah			
• Program Pengembangan Kesenian Tradisional	32.500.000	32.500.000	100
• Program Pembinaan Sejarah	253.890.000	253.889.000	99,99
• Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	818.000.000	817.199.000	99,90
• Program	656.000.000	654.700.000	99,80

Pengelolaan Permuseuman			
TOTAL JUMLAH	5.180.578.129	4. 783.639.173	92,38

Sumber Data: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Kebudayaan 2021



BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

A. Simpulan Umum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang mengarah pada upaya pengelolaan dan pengembangan serta peningkatan kualitas Pelestarian Nilai – Nilai Budaya merupakan aspek kehidupan budaya masyarakat yang memberikan kontribusi pada nilai –nilai sejarah budaya agar terjaga kelestariannya yang diwariskan secara turun temurun oleh generasi agar dalam pelestarian nilai – nilai budaya dan kearifan lokal sebagai aset budaya baik berupa Karya Seni, benda Situs

dan Cagar Budaya maupun dari segi pemasaran dan promosi budaya.

Secara keseluruhan capaian kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan menunjukkan tingkat capaian memenuhi target yang telah direncanakan dan memberikan gambaran keberhasilan, namun masih terdapat beberapa kegiatan yang belum mencapai target dengan melakukan evaluasi berkenaan perencanaan dalam peningkatan kualitas terhadap sarana yang telah ditetapkan sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya

B. Kendala Pelaksanaan dan Upaya Mengatasi

Pencapaian sasaran indikator kinerja utama atau (IKU) sudah optimal, namun masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya sehingga membutuhkan beberapa upaya untuk mengatasinya.

Seperti yang terlihat pada Bab 1 bahwa isu-isu strategis dan evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya, terdapat beberapa kendala yang ada di Dinas Kebudayaan:

1. Masih rendahnya dukungan Sumber Daya Aparatur (SDA) seperti tidak adanya tenaga Pamong Budaya, Tenaga Ahli Cagar Budaya, Kurator Museum dan sebagainya,
2. Belum Optimalnya Ketersediaan Data dan Informasi Warisan Budaya, maupun Data koleksi Museum yang valid,
3. Minimnya Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung dan;
4. Belum disusun Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbub) tentang Standar Prosedur Operasional (SOP) Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Warisan Budaya.

Untuk mengatasi hambatan dalam pencapaian target kinerja maka Badan Pendapatan daerah Kabupaten Bone melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan capaian kinerja yaitu sebagai berikut :

1. Penting untuk dilakukan upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur (SDA) di lingkup Dinas Kebudayaan dengan mengirim staf untuk mengikuti Bimbingan Teknis (bimtek) dan Diklat Fungsional Pamong Budaya, Ujian Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya, Seminar Permuseuman dan semacamnya,
2. Pembuatan Sistem Informasi Kebudayaan yang memuat segala macam data dan informasi yang terkait dengan letak dan kondisi peninggalan warisan budaya serta pelaku seni/adat/sejarah yang masih ada,
3. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung, dan
4. Penyusunan perangkat peraturan perundang-undangan kebudayaan.

Demikian laporan kinerja ini disusun dengan harapan dapat digunakan sebagai bahan kajian dan memerlukan kritikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan yang akan dilaksanakan serta menjadi masukan perbaikan kinerja ditahun mendatang.



Watampone, 25 Februari 2022
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN

A. ANSAR AMAL, SH., M., ST

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19620902 199203 1 005

LAMPIRAN

- Penghargaan



MTRAAA0155

Nomor: 0025/F4/KB.04.04/2021



Sertifikat

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
Menetapkan

TARI PAJOGE MAKUNRAI BONE

dari Provinsi Sulawesi Selatan
sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia

Jakarta, 7 Desember 2021

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A.